



SEMINAR NASIONAL KEINSINYURAN (SNIP)

Alamat Prosiding: snip.eng.unila.ac.id



ANALISI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (STUDI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PT. SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK KABUPATEN OGAN KOMERING ULU)

Yesi Yandriani ^{a*}, Muh.Sarkowi ^b dan Herry Wardono ^b

^aBadan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Jl. A Yani, Kemelak, Baturaja 32111

^bProgram Study Program Profesi Insinyur (PSPPI), Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro,
Bandar Lampung 35145

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p><i>Riwayat Artikel :</i> <i>Masuk 10 Agustus 2023</i> <i>Diterima 10 September 2023</i></p> <p><i>Kata Kunci :</i> <i>Implementasi kebijakan,</i> <i>pengelolaan lingkungan hidup</i></p>	<p>Permasalahan lingkungan hidup yang menjadi sumber pencemaran utama daerah Kecamatan Baturaja Barat berasal dari limbah debu dari proses produksi PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk dan kebiasaan masyarakat di sepanjang aliran sungai Ogan membuang sampah dan limbah ke sungai. Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari dan menganalisis implementasi kebijakan dan peran aparat Dinas Lingkungan Hidup dilihat dari indikator, Communication (Komunikasi), Resources (sumber daya), Disposition (disposisi) dan Bureaucratic the Structure (struktur birokrasi) dalam pengelolaan limbah debu dari industri produksi PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk di Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis Interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi memiliki hubungan yang strategis terhadap implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu khususnya proses pengendalian limbah yang mencemari udara dan aliran sungai Ogan. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan limbah industri di Wilayah Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu masih banyak dihadapkan dengan hambatan baik teknis dan non teknis berupa terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan pengetahuan/keterampilan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup, dan kurangnya pemahaman sektor swasta dan masyarakat yang menghasilkan limbah yang menimbulkan pencemaran lingkungan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu serta struktur kelembagaan yang belum memadai sesuai kebutuhan pembangunan sektor lingkungan.</p>

I. PENDAHULUAN

Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, serta mensyaratkan terpeliharanya pelestarian fungsi dan kemampuan lingkungan hidup sebagai tumpuan bagi keberlanjutan pembangunan. Namun kenyataan menunjukkan, bahwa degradasi atau penurunan kualitas lingkungan terus terjadi, antara lain pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair dari kegiatan industri, rumah sakit, limbah domestik yang belum dikelola dengan baik serta pencemaran udara yang berasal dari sumber bergerak (kendaraan bermotor), sumber tidak bergerak dari cerobong asap pabrik dan kebakaran hutan (Budiharjo, 2002).

Kondisi lingkungan hidup sudah mulai memprihatinkan serta kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Berbagai regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup mulai dibuat, tak terkecuali di Negara Republik Indonesia. Pemerintah telah membuat beberapa regulasi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa usaha dan kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Sedangkan lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia yang perilakunya mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan industri PT. Semen Baturaja (persero) Tbk. Proses produksi perusahaan tersebut berpotensi menimbulkan limbah, limbah yang dihasilkan berupa debu. Pada dasarnya permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan merupakan tanggung jawab dari perusahaan tersebut, akan tetapi penanganannya masih kurang optimal sehingga menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat akibat limbah debu dari proses produksi perusahaan ini. Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui Dinas Lingkungan Hidup membuat kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Diharapkan dari kebijakan ini bisa diimplementasikan dengan baik oleh pihak-pihak terkait agar kualitas lingkungan hidup terjaga serta bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Memperhatikan kondisi di Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini dapat dirumuskan isu-isu strategis lingkungan hidup, sebagai berikut:

1. Penurunan kualitas udara akibat debu pencemaran

kegiatan proses produksi industri PT. Semen Baturaja (persero) Tbk.

2. Penurunan kualitas air dan tanah (sungai, danau, laut dan air tanah) akibat pencemaran oleh masyarakat yang belum sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan hidup, misalnya masyarakat masih membuang sampah ke sungai-sungai.
3. Pemahaman lingkungan hidup masyarakat masih rendah.
4. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Kerusakan habitat / akibat perubahan fungsi lahan (Renstra BLH SU, 2010).

Analisis kebijakan terhadap lingkungan hidup menjadi sangat penting atau dengan kata lain memiliki nilai yang amat strategis. Informasi mengenai kebijakan terhadap lingkungan hidup dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap kebijakan terhadap lingkungan hidup sangat penting untuk diketahui, sehingga pengukuran kinerja aparat hendaknya dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan evaluasi untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu analisis kebijakan terhadap lingkungan hidup merupakan analisis interpretasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja.

Menurut Osborne Dan Platrik (2004), bahwa dalam suatu organisasi perlu adanya pemisahan antara manajemen puncak dan operasional, sehingga memungkinkan manajemen puncak mengfokuskan konsentrasi pada pengambilan keputusan dan pengarahan. Sedangkan kegiatan operasional sebaiknya dijalankan oleh staf sendiri, dimana masing-masing memiliki misi, sasaran, ruang lingkup, tindakan serta otonominya sendiri. Upaya mengarahkan, membutuhkan orang yang mampu melihat seluruh visi dan peluang serta mampu menyeimbangkan antar berbagai tuntutan yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya. Hal tersebut membutuhkan personil yang bersungguh-sungguh fokus pada visi, misi dan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut melaksanakannya dengan baik.

Pemberian pelayanan publik oleh aparat pemerintah kepada masyarakat (publik) merupakan perwujudan dan fungsi aparat pemerintah sebagai pelayan masyarakat (abdi), disamping sebagai abdi negara. Dalam konteks ini masyarakatlah sebagai aktor utama (pelaku) pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan pelayanan publik yang prima. Pada kondisi ini aparat pemerintah dituntut untuk lebih mampu memperbaiki kinerjanya (pelayanan prima) dan diharapkan lebih mampu merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera (Dwiyanto, 2002).

Kemudian bagaimana kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah itu dapat terjadi sinkronisasi yaitu saling bersentuhan, menunjang dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Suasana tersebut dapat diciptakan jika aparat pemerintah memiliki semangat pengabdian yang tinggi dan

profesional dalam pemberian pelayanan publik. Pada sisi lain perkembangan dan perubahan yang diakibatkan oleh globalisasi yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seperti disektor ekonomi, investasi, barang dan jasa, menjadikan para pelaku birokrasi (aparatur) semakin ditantang dan dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada masyarakat. Pada tataran inilah, kinerja birokrasi pelayanan publik menjadi suatu isu yang semakin strategis karena perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Buruknya kinerja birokrasi selama ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Dwiyanto, 2002).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai salah satu Lembaga teknis yang berada pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu mempunyai peranan strategis dalam rangka pencapaian tujuan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas utama membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan Pembinaan dan koordinasi Lingkungan Hidup di Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi antara lain : menyelenggarakan pembinaan teknik lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan dan pengelolaan lingkungan dan melakukan pengkajian dan evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keberhasilan Badan Lingkungan Hidup akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, maka sangat dituntut kinerja yang optimal dari Dinas Lingkungan Hidup tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai suatu organisasi bukan hanya tergantung pada bagaimana organisasi tersebut dalam melaksanakan proses dan aktivitas rutin maupun kondisional dalam suatu kerangka perencanaan strategis. Peningkatan efesiensi dan efektivitas yang mendorong kearah inovasi memerlukan usaha-usaha yang tercantum dengan baik dan terjamin keberlanjutannya untuk mempertajam arah dan meningkatkan kelayakan kegiatan. Program, maupun kebijaksanaan dalam perspektif kebijakan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

Bagaimana implementasi kebijakan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup studi kasus Limbah Debu Pengolahan Produksi PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk Kabupaten Ogan Komering Ulu ?

II. TINJAUAN PUSTAKA

• Kebijakan Publik

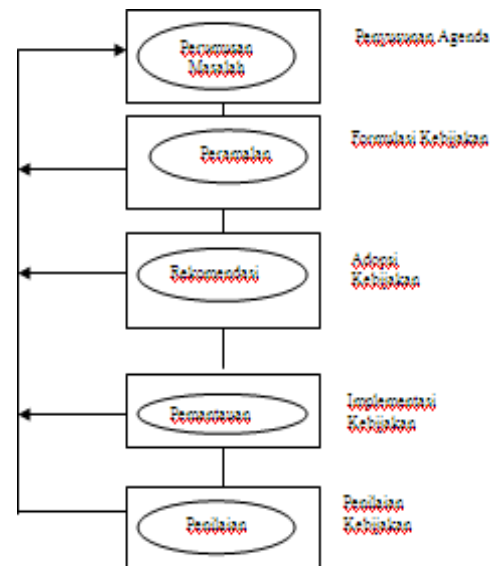
Menurut pendapat Thomas R. Dye (dalam Islamy, 2000:18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "Is whatever governments choose to do or not to do" ("apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan"). Dari pendapat ini mengandung pengertian

sebagai suatu keputusan untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan, sehingga diam pun bisa dianggap sebagai suatu kebijakan. Selanjutnya Richard Rose (dalam Winarno, 2002:15) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai "Serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan

Menurut William Dunn setiap kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yang saling bergantung menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Aktivitas kebijakan yang termasuk dalam prosedur analisis kebijakan seperti yang digambarkan oleh William Dunn di bawah ini :

Gambar 1.

Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan Dengan Tipe-Tipe Pembuatan Kebijakan



Sumber : Dunn, 2003 : 25

Menurut Winarno (2002:17) bahwa, kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik meliputi tiga kegiatan pokok yaitu :

- Perumusan Kebijakan publik
- Implementasi kebijakan publik
- Evaluasi Kebijakan publik

• Pengertian Implementasi Kebijakan

Sebagaimana pendapat Nugroho (2004:164) dilukiskan bahwa "implementasi kebijakan yang berpola dari atas kebawah (*top-bottom*) versus dari bawah keatas (*bottom-top*) dan pola pemilahan implementasi yang berpola paksa (*command and control*) dalam penerapan kebijakan prosesnya bisa dari bawah sehingga tercipta partisipasi publik dan diharapkan akan dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan sebagai implementasi kebijakan yang responsif.

- **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi**

Kebijakan

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang sangat kritis dan strategis, sebagaimana dikemukakan Edwards III dalam Tachjan (2008:56) bahwa dalam proses implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor : 1) *Communication*, 2) *Resources*, 3) *Disposition*, 4) *Bureaucratic the structure*. Faktor-faktor tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Komunikasi (*Communication*) :

Menurut Edwards III dalam Winarno (2008:175) bahwa faktor komunikasi ini penting agar pelaksanaan kebijakan bisa efektif dan mereka yang akan melaksanakan keputusan harus dapat mengetahui apa yang mereka lakukan. Keputusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan harus disampaikan kepada pelaksana dengan tepat sebelum mereka melaksanakannya. Adapun unsur-unsur dalam komunikasi menurut Edwards III dalam Winarno (2008:175) adalah :

1) *Transmission* (penyampaian), 2) *Clarity* (kejelasan), 3) *Consistency*. Ketiga unsur-unsur tersebut dilaksanakan dengan saling mempengaruhi satu sama lain.

2. Sumber Daya (*Resources*) :

Sumber daya merupakan salah satu unsur yang penting agar implementasi kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini sejalan dengan pendapat Handoko (1995:233) bahwa "Sumber daya terpenting dalam suatu organisasi adalah sumber daya manusia orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreatifitas dan usaha mereka kepada organisasi. Beberapa tugas-tugas kepemimpinan kritis manajer mencakup penarikan, penyeleksian, pengembangan dan penggunaan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan organisasi tanpa orang-orang yang cakap organisasi dan manajemen akan gagal mencapai tujuan."

3. Disposisi (*Disposition*) :

Menurut Edwards III dalam Winarno (2008:194) unsur-unsur penting dalam disposisi adalah :

- o *Effect of Disposition*,
- o *Staffing the bureaucracy*,
- o *Incentives*.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic the Structure*)

Ada 2 (dua) hal penting dalam struktur birokrasi menurut Edwards III dalam Winarno (2008:203-204) yaitu :

- o *Standard Operating Procedures (SOP)*.
- o *Fragmentation* yaitu tata cara yang lazim sebagai petunjuk pelaksanaan unit organisasi dalam melaksanakan suatu

kebijakan.

• Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dan di rubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat di katakana dalam Pasal 1 Ayat 1 lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Untuk menjaga mutu dan keseimbangan kualitas lingkungan hidup bagi kehidupan umat manusia agar dilakukan pengelolaan lingkungan hidup. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009

Pasal 1 Ayat 2 perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu khususnya dalam pengelolaan limbah industri khusus pencemaran debu oleh PT. Semen Baturaja (persero) Tbk, perlu memperhatikan faktor-faktor strategis antara lain :

- o Kebijakan yang disusun harus mengkondisikan untuk tumbuhnya kesadaran masyarakat, swasta untuk ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan limbah industri untuk menciptakan kualitas lingkungan
- o Organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan limbah industri yaitu Dinas Lingkungan Hidup, BPMP sebagai perijinan, serta dinas-dinas lain bersama LSM, Swasta/perusahaan dan Masyarakat.
- o Faktor lingkungan berupa kondisi sosial budaya masyarakat dalam hal ini perlu dukungan penuh masyarakat untuk terciptanya kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat yang baik serta kondisi ekonomi dimana pengelolaan limbah industri membutuhkan dukungan pembiayaan (keuangan) yang besar dari masyarakat dan memungkinkan terbukanya pekerjaan baru bagi para warga setempat.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017:9) adalah

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Lokasi penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Dinas Lingkungan Hidup. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu observasi, pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai peneliti yaitu model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (1992: 16) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

IV. PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah debu Industri PT. Semen Baturaja (persero) Tbk dan limbah-limbah lainnya yang ditinjau dari permasalahan diantaranya Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Struktur Birokrasi dan Disposisi sebagai berikut :

- **Komunikasi**

Salah satu faktor yang berperan dalam proses implementasi kebijakan adalah komunikasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penyampaian informasi oleh pimpinan kepada staf guna implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagian informan menyatakan sangat baik. Hal ini menunjukkan adanya kemauan baik oleh pimpinan untuk mengimplementasikan kebijakan pengendalian limbah guna meningkatkan kualitas Lingkungan hidup daerah. Hal ini ditunjukkan dengan pimpinannya sering melakukan komunikasi secara jelas dengan staf nya agar kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah tersebut dapat berjalan sesuai harapan. Para informan menyatakan bahwa komunikasi berjalan dengan jelas karena pimpinan sering melakukan rapat-rapat berkala pada setiap awal bulan. Mereka menyatakan sangat jelas karena setiap penjelasan dapat di pahami. Sebagian juga mengatakan cukup jelas demikian pula dengan frekwensi informasi sebagai informan mengatakan sangat jelas ada juga sebagian yang menjawab kurang jelas karena mereka sulit memahami permasalahan lingkungan hidup. Untuk tingkat penerimaan informasi oleh pegawai, hasil pengamatan dan wawancara menunjukkan sebagai besar informan menjawab baik namun sebagai besar yang kurang menerima karna kondisi latar belakang pendidikan yang berbeda serta tingkat pendidikan dan keahlian yang belum menyeluruh untuk seluruh staf.

Selain komunikasi antar pimpinan dengan staf juga terjadi komunikasi antar staf dengan staf atau antara kepala sub dinas dan kepala seksi yang satu dengan yang lain. Hal ini di mungkin karena pegawai selalu menjalin kerjasama agar

kebijaksanaan sesuai perintah atasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan menyatakan baik karena komunikasi terus berlangsung secara baik. Sementara itu sebagian informan juga menyatakan bahwa tingkat komunikasi antar staf seringkali kurang berjalan dengan baik karena hampir personil disetiap sub unit kerja memiliki tingkat pendidikan dan latar belakang pribadi yang berlainan antara satu dengan yang lain.

Dalam pencegahan upaya pemecahan masalah dan pembuatan keputusan guna pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu pimpinan belum secara maksimal mendorong dan menggerakkan para pejabat eselon dibawahnya maupun para stafnya untuk berupaya bekerja lebih giat. Hasil wawancara dengan para informan terdapat keterangan bahwa keadaan koordinasi selalu baik karena ada komunikasi dan koordinasi sedangkan beberapa informan menjawab kurang baik karena koordinasi hanya terjadi antara pimpinan dengan pejabat tertentu karena dianggap lebih memahami masalah lingkungan hidup.

Pimpinan juga berkewajiban untuk menjelaskan tujuan sebuah kebijakan kepada para pegawai sebagai unsur pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa informan menyatakan baik karena dapat dipahami dan sebagian mengatakan cukup untuk di pahami, demikian pula dengan pengulangan penyampaian informasi tentang keberadaan sebuah kebijakan, terdapat beberapa informan yang mengatakan sangat baik, dan ada beberapa yang menjawab baik dan cukup baik.

Keterikatan para pegawai sebagai sesama aparatur dalam birokrasi, diperoleh data dari informan yang menjawab cukup baik, ada yang mengatakan baik dan sebagian yang menjawab cukup baik karena mereka memiliki kesamaan pengetahuan dan pengalaman yang sama terbatasnya dalam hal lingkungan hidup. Unsur informasi sebagai aspek yang menjadi salah satu inti dari pada komunikasi dalam proses implementasi sebuah kebijakan. Kebijakan yang telah ditetapkan perlu ditindak lanjut dengan pelaksanaan oleh aparat birokrasi. Untuk keperluan ini sangat diperlukan informasi yang, akurat dan efektif, karena jika tidak demikian aparat pelaksana kebijakan/keputusan akan melakukan kesalahan dalam melaksanakan kebijakan dan kebijakan akan mandek. Unsur lain dalam komunikasi adalah bagaimana kebijakan itu harus jelas kepada para pelaksana. Mereka sebagai para implementor harus memahami dengan jelas akan suatu kebijakan dari sisi ruang, tempat dan waktu pelaksanaan sebuah kebijakan. Unsur lain juga adalah konsistensi dan kepastian kebijakan bagi

para pelaksana agar tidak menimbulkan keraguan dan kebingungan dalam arti kebijakan harus pasti dan tidak menimbulkan keraguan dan pertanyaan yang sulit untuk dipahami.

Hasil penelitian memperlihatkan tentang peran komunikasi dimana secara keseluruhan, sebagian besar informan memberikan tanggapan baik dan sebagian kecil menjawab cukup terlaksana dengan baik. Hal ini berarti peran komunikasi telah dapat berjalan dengan normal/baik dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- **Sumber Daya**

Hasil penelitian terhadap faktor sumber daya yang diperlukan untuk implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu telah diperoleh data bahwa beberapa informan menjawab memadai, cukup memadai dan lainnya menjawab kurang memadai. Selain itu jumlah pegawai juga memberikan kontribusi penting terhadap implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa informan menjawab baik dan memadai, ada yang menjawab cukup dengan keterampilan pegawai yang belum mengerti tentang masalah lingkungan hidup. Demikian juga tentang biaya yang diperlukan sebagai informan menjawab baik dan telah tersedia karena terbangunnya fasilitas gedung dan peralatan lainnya termasuk kendaraan operasional namun sebagian menyatakan belum paham tentang bagaimana kegiatan operasionalnya nanti. Ketersediaan waktu untuk implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu cukup memadai namun sangat disayangkan karena seluruh waktu yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam operasional kegiatan rutin dinas. Demikian dengan ruang kantor juga telah memadai karena terdapat gedung kantor yang telah lengkap dengan fasilitas meubelairnya. Namun sebagian juga menjawab kurang baik karena sarana pendukung kegiatan kantor tersebut belum tersedia secara

menyeluruh untuk setiap sub unit kerja. Demikian pula telah tersedia satu unit gedung laboratorium yang masih dipersiapkan fasilitas meubelair dan peralatan laboratorium yang masih memerlukan tenaga pengguna yang harus terampil dan memahami baik pekerjaan laboratorium.

Aspek sumber daya dalam proses implementasi kebijakan publik khususnya implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal pengendalian limbah khususnya debu industri PT. Semen Baturaja (persero) tbk di Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam hal ini termasuk juga bagian yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian lebih serius. Berdasarkan hasil penelitian bahwa aspek sumber daya dari sisi jumlah, kualitas, pembiayaan, dan pegawai berpengalaman sebagian besar informan menjawab cukup baik atau cukup memadai dalam artian perlu ada peningkatan dari sisi kualitas dan pengalaman demikian pula dengan sarana dan prasarana, ruang kantor dan waktu yang tersedia sebagian besar informan menjawab baik dan memadai sedangkan peralatan yang tersedia sebagian besar informan menjawab kurang memahami karena sedang dalam proses penyediaan dan belum bisa dimanfaatkan.

- **Disposisi**

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah salah satu aspek penting dalam proses implementasi sebuah kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian tentang peran disposisi dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu khususnya untuk pengendalian limbah telah ditemukan data melalui informan bahwa sebagian menjawab baik dan sebagian menjawab kurang baik memahami dengan baik karena dasar pendidikan yang berbeda dan mereka belum memiliki keahlian di bidang lingkungan hidup. Demikian pula dengan kemampuan melaksanakan tugas sebagian informan menjawab baik, sebagian juga menjawab cukup baik dan sebagian lainnya menjawab kurang baik. Demikian pula dengan komitmen pegawai dan

keutamaan keberhasilan oleh pegawai sebagian informan menjawab kurang baik karena mereka kurang memahami pekerjaan dengan baik dan sebagian juga mengatakan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa peran disposisi dari aspek pelaksanaan tugas, komitmen pegawai, keberhasilan kebijakan sebagian besar informan memberikan jawaban bahwa selama ini baik, dan pemahaman tugas sebagian besar informan menjawab cukup baik sedangkan keputusan operasional sebagian besar pegawai menjawab kurang baik mereka sendiri kurang memahami keputusan operasional tersebut.

• **Struktural Birokrasi**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk peran struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Dinas Lingkungan Hidup khususnya tentang pengelolaan Limbah debu Industri PT. Semen Baturaja (persero) Tbk di Kecamatan Baturaja Barat menunjukan bahwa terdapat informan yang menyatakan sangat baik, sedangkan sebagian besar informan menyatakan kurang baik karena akibat penggabungan bidang antara bidang pengendalian dan bidang penegakan hukum yang berbeda dengan latar belakang staf yang berbeda pula.

Promosi jabatan dalam rangka peningkatan karier pegawai juga telah mengurangi jumlah pegawai berpengalaman, kurangnya untuk mengikuti kursus pegawai pada program kursus Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk kepentingan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Sementara itu perubahan struktur organisasi juga telah mempengaruhi pembagian tugas dimana terdapat sebagian informan menyatakan baik dan juga sebagai informan menyatakan kurang baik. Demikian pula dengan koordinasi unit kerja sebagai kecil informan menyatakan baik, sedangkan sebagian besar informan menyatakan kurang baik karena kurang berjalan dengan baik yang juga disebabkan oleh karena struktur kelembagaan yang berbentuk dinas. Tentang kewenangan dan tanggung jawab separuh informan menyatakan baik dan separuh informan lainnya menyatakan cukup baik. Demikian pula dengan aspek kesesuaian bidang informan menyatakan sesuai dan baik sebagian lainnya menyatakan kurang baik. selanjutnya tentang rasa saling menghargai

pekerjaan separuh informan menyatakan baik, separuh informan lainnya menyatakan cukup.

Berdasarkan data sebagaimana diuraikan diatas maka terlihat tanggapan informan pada lokasi penelitian yang lebih dominan menyatakan struktur birokrasi baik pada aspek pembagian tugas, dan sesuai bidangnya dan tanggapan cukup baik pada aspek prosedur kerja, tanggung jawab dan saling menghargai pekerjaan sedangkan tanggapan bahwa struktur birokrasi kurang baik terhadap pada aspek pembagian tugas dan koordinasi antar unit kerja antara instansi karena struktur organisasi yang berbentuk dinas dan telah digabungkan dengan dinas lainnya.

Permasalahan Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Struktur Birokrasi dan Disposisi tersebut merupakan dimensi penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam hal proses pengendalian limbah di Kabupaten Ogan Komering Ulu termuat dalam Peraturan Daerah. Pada dimensi komunikasi pada intinya memiliki indikator khususnya seperti penyampaian informasi oleh pimpinan dimana hasil wawancara menyatakan bahwa informasi dari pimpinan kepada bawahan baik dan jelas dengan tingkat frekuensi yang cukup baik. Hal ini berarti bahwa kecil kemungkinan untuk terjadi kesalahan atau kekeliruan bawahan dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah khususnya pengendalian limbah debu industri PT. Semen Baturaja (persero) Tbk.

Pada dimensi sumber daya yang merupakan gabungan seluruh potensi berupa dana dan daya serta peralatan yang diperlukan untuk mendukung seluruh proses implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Keadaan pegawai sebagai sumber daya manusia yang tersedia pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan hasil wawancara bahwa dari sisi jumlah, pegawai sudah cukup baik namun dari sisi kualitas dan keahlian yang dimiliki untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan daerah masih tergolong kurang memadai. Pada aspek pembiayaan yang diperlukan guna operasional kegiatan tergolong belum cukup baik dalam hal ini perlu perbaikan dan peningkatan sumber pembiayaan yang mendukung implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Demikian pula peralatan (sarana prasarana) yang diperlukan untuk sementara berdasarkan hasil penelitian ternyata pada mulanya peralatan sangat terbatas namun sedikit demi sedikit tersedia dan sedang diupayakan untuk

peningkatan baik jumlah maupun mutu sehingga keadaan peralatan pada saat penelitian dilakukan melalui pengamatan di lapangan ternyata sudah hampir mencukupi sehingga diharapkan proses pembuangan limbah industri dan limbah lainnya akan segera dapat berjalan dengan baik. Hanya saja sampai saat penelitian berlangsung juga keadaan tenaga pengelolaan pengendalian limbah yang berpengalaman belum tersedia sehingga proses pembuangan limbah berupa debu proses produksi pabrik belum dapat berjalan secara maksimal. Faktor lain juga yang memainkan peran dalam implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada proses pembuangan limbah di Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah disposisi atau kecenderungan dimana sikap pegawai juga mempengaruhi kegiatan organisasi dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Ogan Komering Ulu dapat berjalan atau tidak juga ditentukan oleh bagaimana para pelaksana kebijakan dapat mendukung atau menentang kebijakan tersebut. Dukungan terhadap kebijakan ini tercipta karena pelaksana kebijakan cukup memahami tugasnya dengan baik dan selain itu mereka dapat melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dari data yang didapatkan bahwa sebagian pelaksana kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu telah memiliki komitmen dan mengutamakan keberhasilan dengan cukup baik terhadap tugasnya walaupun harus dengan kepemimpinan yang tegas. Faktor disposisi mengandung makna *effect of disposition* (efek disposisi), *staffing the bureaucracy* (pegawai birokrasi), dan *incentives* (insentif), maka nampak bahwa faktor disposisi khususnya tentang pemahaman dan pelaksanaan tugas oleh parabiokrat pelaksana kebijakan pada umumnya belum cukup baik dan belum memungkinkan yang berarti faktor disposisi juga merupakan hal penting yang ikut berperan dalam proses pembuangan limbah cair. Struktur birokrasi menjadi salah satu faktor kritis atau aspek yang juga ikut berperan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup khususnya proses pembuangan limbah debu PT. Semen Baturaja (persero) tbk di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Struktur birokrasi dalam perannya terdapat indikator khususnya yang meliputi pembagian tugas dimana terdapat separuh menilai baik sementara separuhnya menilai kurang baik. Proses implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pembuangan limbah

industri PT. Semen Baturaja (persero) tbk dan limbah rumah tangga lainnya menurut hasil pengamatan bahwa nampaknya implementasi kebijakan pembuangan limbah ini belum baik sesuai harapan. Hal ini disebabkan :

- Target kebijakan pengelolaan (pengendalian) lingkungan hidup ini sebagaimana termuat dalam judul maupun isi adalah sebagai sarana perolehan pendapatan asli daerah sektor lingkungan hidup yang bersumber dari retribusi atas ijin pembuangan dan lokasi pembuangan limbah industri.
- Maksud dan tujuan kebijakan pengelolaan (pengendalian) lingkungan hidup tersebut adalah demi kepentingan dan keselamatan lingkungan hidup khususnya sumber air bagi makhluk hidup (fauna dan flora) yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Namun dalam kebijakan pengelolaan ini terdapat ketidaksesuaian antara maksud dan tujuan untuk melindungi kepentingan kehidupan makhluk hidup sementara isi kebijakannya lebih kepada upaya peningkatan pendapatan.
- Sasaran kebijakan pengelolaan (pengendalian) lingkungan hidup ini belum menyeluruh untuk semua lapisan masyarakat. Kebijakan ini nampaknya hanya diberlakukan bagi usaha/kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha baik oleh swasta maupun pemerintah, sedangkan masyarakat secara perorangan maupun kelompok belum dapat dijangkau oleh kebijakan ini. Sementara limbah domestik maupun industri rumah tangga juga berkemungkinan mengandung B3 (bahan Berbahaya Beracun) seperti Industri kecil menengah tahu, kandang ternak dan lain sebagainya.

V. PENUTUP

• Kesimpulan

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan limbah debu dari proses produksi PT. Semen Baturaja (persero) tbk pada wilayah Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu masih banyak dihadapkan dengan hambatan baik teknis dan non teknis berupa terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan pengetahuan dan keterampilan teknis di bidang pengelolaan lingkungan hidup, dan kurangnya pemahaman sektor swasta yang menghasilkan limbah tersebut untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu serta struktur kelembagaan yang belum memadai sesuai kebutuhan pembangunan sektor lingkungan hidup.

• Saran

Diperlukan sinergitas antar Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat khususnya Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah khususnya proses pengendalian limbah debu PT. Semen Baturaja (persero) tbk yang kadang kala meresahkan kesehatan masyarakat khususnya pada Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Daftar Pustaka

- Handoko, Hani, 1995, *Manajemen*. Yogyakarta : BFFE. Bumi Aksara.
- Hosio, J.E., 2006, *Kebijakan Publik Desentralisasi*. Yogyakarta: Laksbang.
- Lubis, M.S., 2007, *Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Maju.
- Tachjan, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Puslit KP2W UNPAD
- Nugroho, Riant, 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung.
- Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.